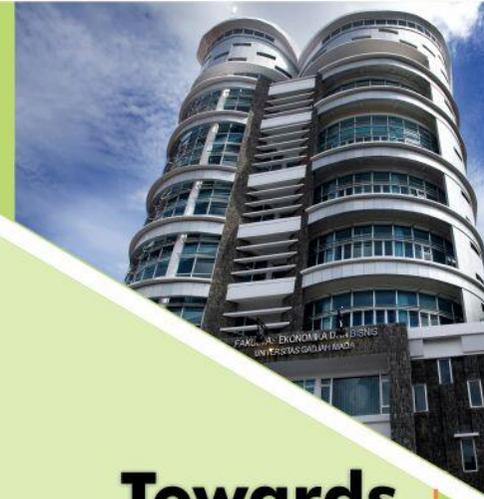


Organized by
Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (IMADEBGAMA)

Proceeding Doctoral Colloquium & Conference



Towards Sustainable Resources

by Empowering Indonesia's Capabilities and Competitiveness

Doctoral Colloquium & Conference
November 18-19, 2016



Master of Science and Doctorate Program
Faculty of Economics and Business
Universitas Gadjah Mada

KATA PENGANTAR

Tantangan bagi mahasiswa program doktor adalah menghasilkan riset-riset berkualitas hingga menjadi disertasi yang layak, termasuk dapat terbit dalam jurnal internasional. Penentuan topik yang selaras dengan kondisi terkini merupakan kontribusi penting dalam suatu riset. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan sumberdaya yang berharga secara berkelanjutan.

Dengan harapan dapat berbagi wawasan dalam riset bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang berkaitan dengan topik tersebut, maka Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis (MD FEB UGM) serta Ikatan Mahasiswa Program Doktor Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (IMADEBGAMA) mengadakan *Economics and Business Doctoral Colloquium and Conference* (EBDCC) dengan tema “*Towards Sustainable Resources by Empowering Indonesia’s Capabilities and Competitiveness*”. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa doktoral maupun akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Makalah meliputi proposal penelitian maupun bagian dari disertasi yang belum pernah dipublikasikan.

Kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaannya. Semoga kita selalu didekatkan dalam kebaikan melalui karya kita ini. Amin.

Salam dari kampus biru,

Yogyakarta, 18 November 2016

Panitia *Economics and Business Doctoral Colloquium and Conference* 2016

KATA PENGANTAR

PENGELOLA PROGRAM MSi DAN DOKTOR FEB UGM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan *Doctoral Colloquium & Conference* tahun 2016 ini. Kegiatan *Doctoral Colloquium & Conference* merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada serta Ikatan Mahasiswa Program Doktor Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (IMADEBGAMA), yang sampai dengan tahun 2016 kegiatan ini sudah diselenggarakan sebanyak delapan kali.

Doctoral Colloquium & Conference merupakan kegiatan yang sangat mendukung visi dan misi kami di Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM, yakni menjadi Program Doktor terbaik di Indonesia dan dihargai di Asia Tenggara, dalam memperluas dan mendistribusi ilmu pengetahuan secara etis dan profesional. Dengan demikian Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM selalu mengedepankan riset dan pendalaman ilmu pengetahuan. Selanjutnya kegiatan *Doctoral Colloquium & Conference* ini diharapkan menjadi ajang diskusi topik-topik terbaru dan menarik, termasuk isu metodologi penelitian terbaru, khususnya di bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi serta dapat meningkatkan atmosfer akademik, khususnya pada lingkungan Program Doktor seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kegiatan *Doctoral Colloquium & Conference* tahun 2016 ini mengusung tema "**Towards Sustainable Resources by Empowering Indonesia's Capabilities and Competitiveness**". Isu Sustainable Resources adalah isu yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Strategi pengelolaan sumberdaya tersebut penting untuk ditingkatkan dan diperkuat agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif Indonesia di kancah persaingan global. Seperti pada kegiatan sebelumnya, *Doctoral Colloquium & Conference* tahun ini juga menghadirkan para pembicara baik dari akademisi, praktisi maupun birokrasi

yang berpengalaman dibidangnya masing - masing. Adapun agenda Doctoral Colloquium & Conference terdiri atas beberapa sesi, yakni sesi seminar, sesi konferensi dan kolokium doktoral. Kami percaya bahwa kegiatan ini akan banyak memberikan nilai tambah kepada kita semua.

Kami selaku Pengelola Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kontribusi mereka menjadikan kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Akhirnya kami ucapkan selamat berpartisipasi dalam *Economics and Business Doctoral Colloquium & Conference 2016*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2016

Ketua Program Doktor Program Studi Akuntansi	Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi	Ketua Program Doktor Program Studi Manajemen
(Prof. Dr. Jogiyanto HM., M.B.A.)	(Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc.)	(Dr. Nurul Indarti, Siviløkonom, Cand.Merc.)

SUSUNAN ACARA DOCTORAL COLLOQUIUM & CONFERENCE 2016

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Gedung Master danDoktor, Ruang BRI lantai 3

Jl. Sosio Humaniora No 1, Bulaksumur

Jumat, 18 November 2016

Waktu	Acara	Keterangan
07.00 - 08.00	Registrasi peserta + Coffee Morning	
08.00 - 08.15	Menyanyikan lagu Indonesia raya dan Sambutan Ketua Pengelola MD Prof. Jogyanto Pembukaan Eko Suwardi, M.Sc, Ph.D (Dekan FEB UGM)	MC
08.15 - 09.00	Keynote speaker: Prof. Dr.Boediono, M.Ec (Wakil Presiden RI 2009-2014)	
09. 00 - 09.10	Penyerahan cinderamata	
09.10 - 09.40	Prof. Dr.Hermanto Siregar (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB)	Plenary session
09.40 - 10.10	Ir. Arif Wibowo, MM (CEO Garuda Indonesia)	Plenary session
10.10 -10. 40	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Sc, Ak. (KetuaDewanSyariah IAI dan Partner PWC)	Plenary session
10. 40 - 11.30	Tanya jawab	Moderator: Prof. Mudradjad Kuncoro
11.30 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 15.00	Paralalel Session 1 1A Ruang Lippo (lantai 2) 1B Ruang Niaga (lantai 2) 1C Ruang Bakrie (lantai 2)	Moderator, pembahas dan panitiakelas Total presenter di 3 session sejumlah 57 presenter

	1D Ruang 201 (lantai 2) 1E Ruang Satya (lantai 2)	
15.00 - 15.30	Ishoma (coffe break)	
15.30 - 17.30	Paralel Session 2 2A Ruang Lippo (lantai 2) 2B Ruang Niaga (lantai 2) 2C Ruang Bakrie (lantai 2) 2D Ruang 201 (lantai 2) 2E Ruang Satya (lantai 2)	Moderator, pembahas dan panitia kelas
17.30 - 18.00	Persiapan Gala Dinner	
18.00 - 21.30	Gala Dinner di Bale Raos	Sambutan: Prof. Dr. MudrajadKuncoro Gubernur DIY

Sabtu, 19 November 2016

Waktu	Acara	Keterangan
08.00 - 08.30	Registrasi peserta (presensi)	Masing-masing kelas
08.30 - 09.00	Coffee morning	Lantai 3
09.00 - 11.00	Paralel Session 3 3A Ruang Lippo (lantai 2) 3B Ruang Niaga (lantai 2) 3C Ruang Bakrie (lantai 2) 3D Ruang 201 (lantai 2) 3E Ruang Satya (lantai 2)	Moderator, pembahas dan panitia kelas
11.15 - 11.30	<i>Concluding remark</i> , penutupan acara dan penyerahan sertifikat. (Best paper award dan door prize)	Ibu Nurul Indarti, Sivilokonom Cand.Merc., Ph.D Tempat: Ruang Auditorium BRI
11.30 - selesai	Makan siang dan ishoma	

Susunan Panitia Pelaksana DCC 2016

Steering Committee: Pengelola MD FEB UGM

- Prof. Jogiyanto Hartono M, M.B.A.,CMA.,Ph.D
- Prof. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc.,Ph.D.
- Nurul Indarti, Sivilekonom, Cand Merc., Ph.D

Penanggung Jawab: Krisnhoe Rachmi Fitrijadi (Ketua IMADEBGAMA)

Organizing Committee:

Ketua Pelaksana : Utama Singgih
Wakil Ketua : Daru Asih
Sekretaris : Sriwidharmanely
Bendahara : Kusharyanti

Sie Sekretariat dan Publikasi:

Koordinator : Diyah Dumasari S

Anggota:

- Tiara Nirmala ,
- M. Roy Aziz .H ,
- Asih Murwiyati,
- Stefani Sisca,
- Puput Tri Komalasari,
- E.Roryana Damar Panuntun
- Riana Wijayanti
- Fajar Sunaradi Swasana

Sie Acara :

Koordinator : Ciplis Gema Qoriah

Anggota:

- Alfitman,
- Deni Edi Prabowo,
- Feryanto
- Anna Purwaningsih,
- Endang Sutrasmawati
- Rini Kuswati
- R. Heru Kristanto HC

- Wiwin Purwanti
- Handayani

Sie Dana dan Sponsorship:

Koordinator : Uswatun Hasanah

Anggota:

- Hijroh Rokhayati,
- Ira Setyaningsih,
- Sidum Sindarto,
- Apriwandi,
- Priyastiwi,
- Wawan Sadtyo Nugroho,
- Tri Widiyanto

Sie Konsumsi:

Koordinator : Nur Widiastuti

Anggota:

- Liza Alvia
- Ratu Ayu Sri Wulandari MA
- Putu Andhi Widayanti

Sie Perlengkapan dan Dokumentasi:

Koordinator : Benediktus Magiardi

Anggota:

- Sutopo Yuwono Sunu
- Raharjo

Sie Transportasi dan Penjemputan

Koordinator : Nur'ain Isqodrin

Anggota:

- Idrisi Raliya Putra,
- Siswadi

Reviewer :

- Fadhliah M. Alhadar
- Neuneung Ratna
- Elok Pakaryaningsih
- Ni Made Sukartini

- Albertus Girik Allo
- Nenny Hendajany
- Syaiful Iqbal
- Dyah Sekar Jatiningih

Trackchairs:

- **Dr. Reni Rosari, M.B.A.**
- **Dr. Sumiyana, Akt., M.Si.**
- **Dr. Amin Wibowo**
- **I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.**
- **Dr. Ertambang Nahartyo, M.Sc.**
- **Akhmad Akbar Susanto, M.Phil., Ph.D.**
- **Suyanto, M.B.A., Ph.D.**
- **Singgih Wijayana, S.E., M.Si., Ph.D.**
- **Heni Wahyuni, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.**
- **Prof. Jogiyanto Hartono M. M.B.A., Ph.D**

Profil Keynote Speaker



Boediono, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB

UGM, lahir di Blitar pada tanggal 25 Februari 1943. Semasa kecilnya melewati pendidikan SD sampai SMA di kota tempat beliau dilahirkan. Setelah lulus dari SMA negeri 1 Blitar tahun 1960, kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada tahun 1965, melanjutkan studi di University of Western Australia dengan beasiswa dari Colombo Plan. Tahun 1972, beliau mendapatkan gelar

Master of Economics dari Monash University Australia. Setelah beberapa saat kembali mengajar di Fakultas Ekonomi UGM, tahun 1975 melanjutkan studi di Amerika, dan pada tahun 1979 memperoleh gelar PhD in Business Economics, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Pada tahun 2006, beliau mendapatkan anugerah Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Perjalanan karirnya dimulai dari tahun 1973 - sekarang sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Pada tahun 1983 - 1988

Beliau mengemban amanah sebagai Kepala Biro Analisa Ekonomi dan Statistik Bappenas selanjutnya tahun 1988 - 1993 Deputy Bidang Fiskal dan Moneter, Bappenas. Perjalanan karirnya semakin cemerlang dari waktu-ke waktu, pada tahun 1993 -1998 menerima amanah sebagai Direktur Bank Indonesia dan berikutnya sekaligus mengemban amanah 1993 -1998 sebagai Gubernur pengganti Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan untuk Indonesia dan Gubernur pengganti Bank Pembangunan Islam untuk Indonesia serta Presiden Komisaris PT. Bank PDFCI tahun 1994-1998. Pada era krisis moneter tahun 1998 - 1999 beliau dipercaya sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Kabinet Reformasi Pembangunan. Tahun 1990-2000 pada masa memulihkan krisis ekonomi, beliau merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional. Reputasi dan kinerja yang baik menempatkan beliau menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dan pada periode 2005 - 2008 sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kabinet Indonesia Bersatu I. Selanjutnya 2008 - 2009 sebagai Gubernur Bank Indonesia serta pada tahun 2009 - 2014 sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Profil Pembicara



Hermanto Siregar dilahirkan di Medan pada tahun 1963. Pendidikan formal untuk bidang ilmu yang ditekuninya ditempuh pertama kali tahun 1982, pada program studi Agribisnis Fakultas University of New England Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tahun 1989-1991, melanjutkan studi pada, Armidale Australia, memperoleh gelar *Diploma in Agriculture Economics* dan *Master of Economics*. Ph.D in Economics untuk bidang *macroeconometrics* diperolehnya melalui pendidikan di Lincoln University, New Zealand antara tahun 1997-2001.

Sejak Bulan Desember 2007, Hermanto Siregar mendapatkan anugerah sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Amanah sebagai Wakil Rektor bidang Sumber Daya Dan Studi Strategik (*Vice Rector for Resources and Strategic Studies*) diembannya sejak tahun 2008. Selain itu, sebagai *Board of Comission* pada Bank BRI Syari'ah antara tahun 2011 sampai dengan 2015.

Pengembangan ilmu ekonomi yang ditekuninya dilakukan melalui aktifitasnya dalam beberapa kegiatan *academic teaching, training for professional* dan *Consultancy*. Aktif mengajar untuk mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi, Ekonomi Pertanian, Ekonomi Publik, Teori Ekonomi Makro, Teori Ekonomi Mikro, Statistika dan Ekonometrika, *Avanced Macroeconomics, Advanced Econometrics, dan Advanced Agricultural & Economic Development*, serta beberapamata kuliah Metode Kuantitatif.

Beberapa kegiatan training sebagai pengembangan bidang keilmuan, juga dilakukan melalui *Decision Making Theory (for Bank Officers), Applied Time Series Analysis and Panel Data Analysis (for Bank Indonesia (Indonesian Central Bank) researchers), Research Methods for Social-Economic Studies as well as Time Series Models and Econometric Simulation (for lecturers in a number of local publicuniversities)*. Sedangkan dalam hal konsultasi untuk riset dan pengambilan kebijakan dilakukan melalui lembaga seperti: FAO, UNDP, UN-ESCAP, JICA, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan beberapa kementerian lain serta lembaga-lembaga pemerintah di tingkat regional.

Sebagai seorang Guru Besar, sangat menjaga konsistensi bidang ilmu dengan berbagai aktivitas yang mendukung dan selalu meningkatkan produktivitas dalam memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian). Aktif dalam berbagai riset yang menghasilkan setidaknya lebih dari 70 artikel terpublikasi baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Berbagai ide pengembangan ilmu disampaikan/dipresentasikan melalui forum konferensi nasional maupun internasional, menulis artikel pada surat kabar, dan memberi komentar pada media audio visual, radio dan televisi terkait isu-isu *macro- and agricultural economic*.

Profil Pembicara



Muhammmad Arif Wibowo

dilahirkan di Banyumas pada tanggal 16 September 1966. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November. Gelar master diraihnya dari Program *Master Management of Air Transportation* dari Universitas Indonesia (UI) yang bekerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Perjalanan karir yang panjang menempatkannya sebagai President and CEO PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2014 sampai saat ini. Karir yang cemerlang ini dimulai dari tahun 1990-1994 melalui posisi *Engineer of Maintenance* dan *Engineering Division*. Tahun 1997-1998 sebagai manajer Interline dan dilanjutkan pada tahun 1999-2000 sebagai *Director Marketing Alliance*. Tahun 2000-2002 sebagai *General Manager Agency and Interline* dan selama 3 tahun berikutnya (2002-2005) sebagai *General Manager for Fukuoka, Japan*. Tahun 2005-2008 karirnya meningkat menjadi *Senior General Manager Area Japan, Korea, China and USA*. Berikutnya, pada tahun 2008-2011 sebagai *Senior General Manager Area Western Indonesia*. Pada tahun 2010 Arif Wibowo juga memperoleh *Certified Professional Marketer* (CPM Asia) dari *Asia Marketing Federation* (AMF). Arif Wibowo, demikian nama lengkapnya merupakan sosok yang dikenal dengan passion dan bermental pemenang sehingga tak mengherankan jika pada enam bulan pertamanya sejak mendapatkan *Air Operation Certificate*, PT Citilink Indonesia di bawah kepemimpinannya, telah melakukan ekspansi secara agresif.

Aktivitas organisasi yang sangat linier dengan bidang yang ditekuninya diantaranya adalah: Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sebagai ketua, Indonesia Marketing Association (IMA) sebagai Ketua, Ketua *Permanent Committee Air Transportation* KADIN (*Indonesia Chamber of Commerce and Industry*) dan sebagai anggota *Board of Trustees* (MWA) ITS Surabaya.

Profil Pembicara



M. Jusuf Wibisana, partner pada KAP Tanudireja, Wibisana dan Rekan (*PricewaterhouseCoopers Indonesia*). Pendidikan Master bidang Akuntansi diperoleh dari Macquarie University, Australia pada tahun 1990. Sebelumnya pada tahun 1983, mendapatkan gelar *Bachelor of Science and Doctorandus*, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pengalaman dan kemampuan dalam bidang ilmunya dibuktikan dengan berbagai afiliasi profesional. Pada tahun 2000-2001, menduduki jabatan sebagai ketua Departemen

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sebagai pendiri dari *Indonesian Association of Receivers/Curators and Administration*. Anggota dari *Indonesian Institute of Certified Public Accountant (IAPI)*. Pada tahun 2001-2009 menjabat sebagai Ketua dari *Indonesia Accounting Standard Board*. Mulai tahun 2011 sebagai anggota komite perbankan syari'ah (*Committee on Syari'ah Banking*), dan menjabat sebagai Ketua *The Syari'ah Accounting Standard Board* sejak tahun 2009.

M. Jusuf Wibisana, memiliki pengalaman pekerjaan (*working experience*) lebih dari 20 tahun yang sangat signifikan dengan bidang profesinya. Memimpin audit pada beberapa perusahaan dan beberapa organisasi non laba. Beberapa lembaga yang menjadi kliennya adalah: Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank BTPN, Bank Jabar Banten Bank Mandiri, Bank OCBC NISP dan Bank BNI. Beberapa perusahaan besar juga tercatat sebagai klien adalah: Pertamina, Elnusa, Rio Tirta, HM Sampoerna, Semen Indonesia (Gresik) Andya Tirta Batam, 3 M, Unilever Indonesia, Telekomunikasi Indonesia dan XL Axiata.

Daftar Isi

Cover			
Kata Pengantar Panitia			i
Kata Pengantar Pengelola Program MSi dan Doktor FEB UGM			ii
Susunan Acara Doktoral Colloquium & Conference 2016			lv
Susunan Panitia			vi
Profil Keynote Speaker: Dr. Boediono, M. Ec			ix
Profil Pembicara: Hermanto Siregar			x
Profil Pembicara: Muhammad Arif Wibowo			xi
Profil Pembicara: M. Jusuf Wibisana			xii
Daftar Isi			xii
Jadwal Presentasi Call For Paper			1
Abstraksi/Full Paper Bidang Akuntansi			
AK1.1	Luciana Spica Almilia Putri Wulanditya Riski Aprilia Nita	Framing Effect and Belief Adjustment Model in Investment Judgment	7
AK1.2	I Kadek Satria Nova Putu Kepramareni	The Relationship between Computer Anxiety and Skill to Use Accounting Software from the Perspective of Age and Locus Of Control	8
AK1.3	Siti Mutmainah Slamet Sugiri	Harmoni Sistem Insentif dan Locus of Control dalam Memengaruhi Kinerja Tim: Suatu Eksperimen	24
AK2.1	Tri Dewi Asdiningsih Siti Khomsatun	Determinants of Disclosing Cross-Segment Earnings Growth Rate Variability and Its Effect on Market Response	25
AK2.2	Mohe Nur Cahyo Sulhani	Analisis Empiris Hubungan Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar	45
AK2.3	Siti Annisa Sofyana NR Handiani Suciati	Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure Level in Annual Report to Earning Response Coefficient with Earning Persistence, Beta and Leverage as Control Variable	46
AK2.4	Jeasy D'Rianti Rawi Tri Neliana	Pengaruh Kepemilikan Asing, Media Exposure, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	74

AK3.2	Nani Ardiyah Provita Wijayanti	Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	97
AK3.3	Nur Anita Chandra Putry Rudy Badrudin	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	98
AK3.4	Lufi Yuwana Mursita	Flypaper Effect Phenomenon and Audit Opinion toward Financial Performance and Rural Development Index: Empirical Study on Indonesia Local Government	99
AK4.1	Syaiful Iqbal Dyah Ekaari Sekar Jatiningsih	The Difference Of Compliance Level Between Taxpayers In The Synergistic And Antagonistic Tax Climate	100
AK4.2	Claudia Sheva Nurrachma Nurmadi Harsa Sumarta Bandi	Internet-Based Information Disclosure Practices: Does Reputation Of Auditor Matters? (Evidence from Indonesia)	101
AK4.3	Surenggono Siti Djamilah	Pendidikan, Pengalaman Menggunakan Informasi Akuntansi dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku UMKM sebagai Prediktor Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Surabaya Barat	102
AK4.4	Siti Asiah Murni Surenggono Siti Djamilah	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil Menengah di Surabaya	120
AK5.1	Yudha Pratamapati Siti Jubaedah Siti Nur Hadiyati	Pengaruh Penerapan Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Independensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Kabupaten dan Kota Cirebon)	136
AK5.3	Andhika Prasetya Gradiyanto Devianti Yunita Harahap	Do We Need a Qualified Internal Auditors Certification? (A Research of the Effectiveness of Indonesian State-Owned Enterprises's Internal Control)	152
AK5.4	Hariman Bone	Pengaruh Audit Tenure Dan Kualitas Audit Sebelumnya Pada Kualitas Audit	173
AK6.1	Mada Purwanto Wahyu Nugroho Mardi	Komparasi Kualitas Laba Perusahaan Perbankan Syariah Dan Perusahaan Perbankan Konvensional	174
AK6.2	Laksmi Dewi NR Handiani Suciati	The Effect Of Audit Committee Competency , Independent Commissioner Proportion, Managerial And Institutional Ownership On Earning	189

Management			
AK6.3	Frendy Miktam Dr. Lodovicus Lasdi, MM, Ak	Penerapan SAK Adopsi IFRS terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	211
AK6.4	Anita Wijayanti Ahmad Wiedodo	The Impact Of Non Financial To The Financial Decision In The Family Business	212
Abstraksi/Full Paper Bidang Managemen			
M1.1	Anton A Setyawan M Farid Wajdi Muzakar Isa	Level of Innovation, Business Strategy Formulation and Performance in SME Clusters	233
M1.2	Kabul Wahyu Utomo	Keterampilan Politik Memoderasi Hubungan Kesamaan Etnis Pemimpin-Bawahan langsung dan Kualitas Hubungan Pemimpin-Bawahan Langsung	234
M1.3	Anggia Sari Lubis	Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Pelayanan dan Word of Mouth Marketing terhadap Keputusan Pembelian Kaum Wanita di Kota Medan dalam Melakukan Perawatan di Klinik Kecantikan	235
M1.4	Hendra Lukito Nor Azilah Binti Husin	Zooming Into West Sumatra Private Universities Performance and Their Intangible Assets	259
M2.2	Arien Shilvinur Evita Puspitasari	Family Ownership, Monitoring, and Tunneling Activity: the Conflict between the Majority and the Minority	260
M2.3	Dewi Regina Vevi Retno Maretha	Pengaruh Kebijakan Loan to Value dan Giro Wajib Minimum terhadap Perfoma Bank Umum di Indonesia 2005: Q1–2015: Q4	279
M2.4	Vera Intanie Dewi Felisca Oriana	Apakah Rasio Keuangan Industri Consumer Goods Indonesia Menyesuaikan Rata-Rata Industri Sebagai Target?	293
M3.1	R. Heru Kristanto HC I Wayan Nuka Lantara	Determinan Cash Holding dan Faktor Pemoderasi terhadap Nilai Perusahaan	294
M3.2	Fajar Eka Prasetya Fifi Swandari Dian Masita Dewi	Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Growth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening	314
M3.3	Bonita Putri Utami Evita Puspitasari	Analysis of Fundamental Factors Affecting Oil and Gas Companies Performances	335
Abstraksi/Full Paper Bidang Ilmu Ekonomi			
E1.1	Hilda Masniarita Pohan Andry Satrio Nugroho Noknik Karliya	Economic Costs and Demographic Implications of Forest Fires in Indonesia	358

E1.2	Adrimas H.A. Rivai Y. Yulius D. Sartika	Impact Analysis of Expansion Area on Economic Development and Local Government Performance in West Sumatra: A Case Study in West Pasaman	359
E1.3	Eva Ervani	Comparative Advantage of Indonesia and East Asian Economies	360
E2.1	Yogi Suherman Ratna Komara Merita Bernik	The Attitude of Citizens about Waste Management Incentives Based on Community (Case Study in Bandung and Malang)	380
E2.2	Ni Made Sukartini Samsubar Saleh Artidiatun Adji Ertambang Nahartyo	Inequity Aversion Preference and Access to Public Goods Provision: Evidence from Laboratorium Experiment	401
E2.3	Dhwo Jubran	The Intention to Use E-Government System (E-Exporting) in a Shipping and Exporting Company in Libya	402
E3.1	Adhitya Wardhono Badara Shofi Dana M. Abd. Nasir	Revisiting the Relationship between Exchange Rate and Macroeconomics Fundamentals in ASEAN 3: Evidence The Exchange Rate Disconnect Puzzle	403
E3.2	Agung Budilaksono	Kebijakan Tarif Cukai Dalam Pengendalian Konsumsi Rokok Dengan Mempertimbangkan Kemampuan Daya Beli Dan Sumber Daya Penerimaan Negara	421
E3.3	Mohtar Rasyid	Respon Asimetri Permintaan Rokok Terhadap Cukai dan Implikasinya terhadap Penerimaan Negara	422
E3.4	Albertus Girik Allo	Apakah Perilaku Merokok Orang Tua Berdampak pada Investasi Sumberdaya Manusia?	445
Abstraksi/Full Paper Kolokium			
Kol1.1	Neuneung Ratna Hayati T Hani Handoko Amin Wibowo Ely Susanto	Transactive Memory Systems and Team Performance: Moderating Effects of Team Member Dominant Personalities	447
Kol1.2	Hening Riyadiningsih	Model Integratif Pembelajaran Psikologis Sebagai Mekanisme Pengembangan Modal Psikologis	448
Kol1.3	Yusmedi Nurfaizal	Modal Psikologis Kreatif dan Perilaku Kreatif Pada UMKM di Wilayah Masbarlingcakep	467
Kol1.4	Weni Novandari	Peran Pembelajaran Berfokus Pengembangan Lingkup Produk (Decisive Product Scope Learning) dalam Meningkatkan Kinerja Inovasi UKM	491

Kol2.1	Dwita Darmawati	Asimetri Konflik Tugas: Pengaruh Komposisi Kepribadian Anggota dan Peran Pemoderasian Manajemen Konflik Kolaborasi terhadap Kreativitas Kelompok	492
Kol2.2	Nidya Dudija	Organizational Culture Reconstruction In Higher Education Change	493
Kol2.3	Cahyaningtyas Ria Urip	Peran <i>Detention Pricing Value</i> Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM	494
Kol2.4	Adelina Lubis	Loyalitas Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) SUMUT	495
Kol3.1	Sunandar	Struktur Corporate Governance terhadap Financial Distrees pada UMKM di Indonesia	496
Kol3.2	Sri Lestari	Manajemen Risiko Keuangan Pada UMKM Di Indonesia	497
Kol3.3	Isnaeni Rokhayati	Konsep Dynamic Capital Structure (DCS) Sebagai Penentu Pengambilan Keputusan Struktur Modal pada UKM	498
Kol3.5	Abdul Haris	Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dengan Sistem Konglomerasi melalui Rencana Kerja (Platform) Kampung Wisata Rotan Galmantoro di Cirebon	499

JADWAL PRESENTASI CALL FOR PAPER

SESI 1A.	13.30 – 15.00	JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016
-----------------	----------------------	---------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
1	1A	Neuneung Ratna Hayati T Hani Handoko Amin Wibowo Ely Susanto	Kol1.1	Universitas Widyatama	Transactive Memory Systems and Team Performance: Moderating Effects of Team Member Dominant Personalities
2	1A	Hening Riyadiningsih	Kol1.2	Universitas Jenderal Soedirman	Model Integratif Pembelajaran Psikologis Sebagai Mekanisme Pengembangan Modal Psikologis
3	1A	Yusmedi Nurfaizal	Kol1.3	Universitas Jenderal Soedirman	Modal Psikologis Kreatif dan Perilaku Kreatif Pada UMKM di Wilayah Masbarlingcakep
4	1A	Weni Novandari	Kol1.4	Universitas Jenderal Soedirman	Peran Pembelajaran Berfokus Pengembangan Lingkup Produk (Decisive Product Scope Learning) dalam Meningkatkan Kinerja Inovasi UKM

SESI 1B.	13.30 – 15.00	JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016
-----------------	----------------------	---------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
5	1B	Luciana Spica Almilia Putri Wulanditya Riski Aprilia Nita	AK1.1	STIE PERBANAS SURABAYA	Framing Effect and Belief Adjustment Model in Investment Judgment
6	1B	I Kadek Satria Nova Putu Kepramareni	AK1.2	Maharaswati Denpasar University	The Relationship between Computer Anxiety and Skill to Use Accounting Software from the Perspective of Age and Locus Of Control
7	1B	Siti Mutmainah Slamet Sugiri	AK1.3	Universitas Diponegoro Universitas Gadjha Mada	Harmoni Sistem Insentif dan Locus of Control dalam Memengaruhi Kinerja Tim: Suatu Eksperimen

SESI 1C.	13.30 – 15.00	JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016
-----------------	----------------------	---------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
8	1C	Tri Dewi Asdiningsih Siti Khomsatun	AK2.1	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati	Determinants of Disclosing Cross-Segment Earnings Growth Rate Variability and Its Effect on Market Response
9	1C	Mohe Nur Cahyo Sulhani	AK2.2	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia	Analisis Empiris Hubungan Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar
10	1C	Siti Annisa Sofyana NR Handiani Suciati	AK2.3	Universitas Padjajaran	Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure Level in Annual Report to Earning Response Coefficient with Earning Persistence, Beta and Leverage as Control Variable
11	1C	Jeasy D'Rianti Rawi Tri Neliana	AK2.4	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	Pengaruh Kepemilikan Asing, Media Exposure, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

SESI 1D.	13.30 – 15.00	JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016
-----------------	----------------------	---------------------------------

No.	SESI	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
12	1D	Anton A Setyawan M Farid Wajdi Muzakar Isa	M1.1	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Level of Innovation, Business Strategy Formulation and Performance in SME Clusters
13	1D	Kabul Wahyu Utomo	M1.2	Universitas Trilogi	Keterampilan Politik Memoderasi Hubungan Kesamaan Etnis Pemimpin-Bawahan langsung dan Kualitas Hubungan Pemimpin-Bawahan Langsung
14	1D	Anggia Sari Lubis	M1.3	Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan	Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Pelayanan dan Word of Mouth Marketing terhadap Keputusan Pembelian Kaum Wanita di Kota Medan dalam Melakukan Perawatan di Klinik Kecantikan
15	1D	Hendra Lukito Nor Azilah Binti Husin	M1.4	Universitas Andalas, Padang Universiti Selangor, Malaysia	Zooming Into West Sumatra Private Universities Performance and Their Intangible Assets

SESI 1E.	13.30 – 15.00	JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016
-----------------	----------------------	---------------------------------

No.	Kode	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
16	1E	Hilda Masniarita Pohan Andry Satrio Nugroho Noknik Karliya	E1.1	Universitas Katolik Parahyangan	Economic Costs and Demographic Implications of Forest Fires in Indonesia
17	1E	Adrimas H.A. Rivai Y. Yulius D. Sartika	E1.2	Universitas Andalas	Impact Analysis of Expansion Area on Economic Development and Local Government Performance in West Sumatra: A Case Study in West Pasaman
18	1E	Eva Ervani	E1.3	Universitas Padjajaran	Comparative Advantage of Indonesia and East Asian Economies

SESI 2A.	15.30- 17.30	JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016
-----------------	---------------------	---------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
19	2A	Dwita Darmawati	Kol 2.1	Universitas Jenderal Soedirman	Asimetri Konflik Tugas: Pengaruh Komposisi Kepribadian Anggota dan Peran Pemoderasian Manajemen Konflik Kolaborasi terhadap Kreativitas Kelompok
20	2A	Nidya Dudija	Kol2.2	Universitas Telkom	Organizational Culture Reconstruction In Higher Education Change
21	2A	Cahyaningtyas Ria Urip	Kol2.3	Universitas Jenderal Soedirman	Peran <i>Detention Pricing Value</i> Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM
22	2A	Adelina Lubis	Kol2.4	Universitas Sumatera Utara	Loyalitas Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) SUMUT

SESI 2B.		15.30- 17.30		JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016	
No.		Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
23	2B	Siti Nur Hadiyati	AK3.1	Universitas Swadaya Gunung Jati	Tingkat Pengetahuan Pegawai Pelaksana Pengadaan Tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
24	2B	Nani Ardiyah Provita Wijayanti	AK3.2	Universitas Islam Sultan Agung	Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
25	2B	Nur Anita Chandra Putry Rudy Badrudin	AK3.3	STIE YKPN Yogyakarta	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta
26	2B	Lufi Yuwana Mursita	AK3.4	STIE Perbanas Surabaya	Flypaper Effect Phenomenon and Audit Opinion toward Financial Performance and Rural Development Index: Empirical Study on Indonesia Local Government

SESI 2C.		15.30- 17.30		JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016	
No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
27	2C	Syaiful Iqbal Dyah Ekaari Sekar Jatningsih	AK4.1	Universitas Brawijaya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	The Difference Of Compliance Level Between Taxpayers In The Synergistic And Antagonistic Tax Climate
28	2C	Claudia Sheva Nurrachma Nurjadi Harsa Sumarta Bandi	AK4.2	University Sebelas Maret	Internet-Based Information Disclosure Practices: Does Reputation Of Auditor Matters? (Evidence from Indonesia)
29	2C	Surenggono Siti Djamilah	AK4.3	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Pendidikan, Pengalaman Menggunakan Informasi Akuntansi dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku UMKM sebagai Prediktor Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Surabaya Barat
30	2C	Siti Asiah Murni Surenggono Siti Djamilah	AK4.4	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil Menengah di Surabaya

SESI 2D.		15.30- 17.30		JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016	
No.		Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
31	2D	Judith Felicia Pattiwael Irawan Vera Intanie	M2.1	Universitas Katholik Parahyangan	The Phases and Length of Firm Life-Cycle
32	2D	Arien Shilvinur Evita Puspitasari	M2.2	Universitas Padjajaran	Family Ownership, Monitoring, and Tunneling Activity: the Conflict between the Majority and the Minority
33	2D	Dewi Regina Vevi Retno Maretha	M2.3	Asisten Peneliti Bank Indonesia Staf Kajian dan Pengembangan Perbankan-Perbanas	Pengaruh Kebijakan Loan to Value dan Giro Wajib Minimum terhadap Perfoma Bank Umum di Indonesia 2005: Q1–2015: Q4
34	2D	Vera Intanie Dewi Felisca Oriana	M2.4	Universitas Katholik Parahyangan	Apakah Rasio Keuangan Industri Consumer Goods Indonesia Menyesuaikan Rata-Rata Industri Sebagai Target?

SESI 2E.		13.30 – 15.00		JUM'AT, 18 NOVEMBER 2016	
No.		Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
35	2E	Yogi Suherman Ratna Komara Merita Bernik	E2.1	Universitas Padjajaran	The Attitude of Citizens about Waste Management Incentives Based on Community (Case Study in Bandung and Malang)
36	2E	Ni Made Sukartini Samsubar Saleh Artidiatun Adji Ertambang Nahartyo	E2.2	Universitas Airlangga Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada	Inequity Aversion Preference and Access to Public Goods Provision: Evidence from Laboratorium Experiment
37	2E	Dhwo Jubran	E2.3	Universitas Brawijaya	The Intention to Use E-Government System (E-Exporting) in a Shipping and Exporting Company in Libya

SESI 3A.		09.00-11.00		SABTU, 19 NOVEMBER 2016	
No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
38	3A	Sunandar	Kol3.1	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Struktur Corporate Governance terhadap Financial Distrees pada UMKM di Indonesia
39	3A	Sri Lestari	Kol3.2	Universitas Jenderal Soedirman	Manajemen Risiko Keuangan Pada UMKM Di Indonesia
40	3A	Isnaeni Rokhayati	Kol3.3	Universitas Jenderal Soedirman	Konsep Dynamic Capital Structure (DCS) Sebagai Penentu Pengambilan Keputusan Struktur Modal pada UKM
41	3A	Abdul Haris	Kol3.5	Universitas Jenderal Soedirman	Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dengan Sistem Konglomerasi melalui Rencana Kerja (Platform) Kampung Wisata Rotan Galmanro di Cirebon

SESI 3B.		09.00-11.00		SABTU, 19 NOVEMBER 2016	
No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
42	3B	Yudha Pratamapati Siti Jubaedah Siti Nur Hadiyati	AK5.1	Universitas Swadaya Gunung Jati	Pengaruh Penerapan Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Independensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Kabupaten dan Kota Cirebon)
43	3B	Fera Tjahjani Widanarni Pudjiastuti	AK5.2	STIE Malangkececwara	The Acceptance of Audit Going Concern Opinion On Companies Listed in Indonesia Stock Exchange
44	3B	Andhika Prasetya Gradiyanto Devianti Yunita Harahap	AK5.3	Universitas Padjajaran	Do We Need a Qualified Internal Auditors Certification? (A Research of the Effectiveness of Indonesian State-Owned Enterprises's Internal Control)
45	3B	Hariman Bone	AK5.4	Universitas Mulawarman	Pengaruh Audit Tenure Dan Kualitas Audit Sebelumnya Pada Kualitas Audit

SESI 3C.	09.00-11.00	SABTU, 19 NOVEMBER 2016
-----------------	--------------------	--------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
46	3C	Mada Purwanto Wahyu Nugroho Mardi	AK6.1	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	Komparasi Kualitas Laba Perusahaan Perbankan Syariah Dan Perusahaan Perbankan Konvensional
47	3C	Laksmi Dewi NR Handiani Suciati	AK6.2	Universitas Padjajaran	The Effect Of Audit Committee Competency , Independent Commissioner Proportion, Managerial And Institutional Ownership On Earning Management
48	3C	Frendy Miktam Dr. Lodovicus Lasdi, MM, Ak	AK6.3	Unika Widya Mandala Surabaya	Penerapan SAK Adopsi IFRS terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
49	3C	Anita Wijayanti Ahmad Wiedodo	AK6.4	Universitas Islam Batik Surakarta	The Impact Of Non Financial To The Financial Decision In The Family Business

SESI 3D.	09.00-11.00	SABTU, 19 NOVEMBER 2016
-----------------	--------------------	--------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
50	3D	R. Heru Kristanto HC I Wayan Nuka L	M3.1	UPN Veteran Yogyakarta Universitas Gajah Mada	Determinan Cash Holding dan Faktor Pemoderasi terhadap Nilai Perusahaan
51	3D	Fajar Eka Prasetya Fifi Swandari Dian Masita Dewi	M3.2	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Growth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening
52	3D	Bonita Putri Utami Evita Puspitasari	M3.3	Universitas Padjajaran	Analysis of Fundamental Factors Affecting Oil and Gas Companies Performances

SESI 3E.	09.00-11.00	SABTU, 19 NOVEMBER 2016
-----------------	--------------------	--------------------------------

No.	Sesi	Nama	Kode	Instansi Asal	Judul Artikel
53	3E	Adhitya Wardhono Badara Shofi Dana M. Abd. Nasir	E3.1	Universitas Jember	Revisiting the Relationship between Exchange Rate and Macroeconomics Fundamentals in ASEAN 3: Evidence The Exchange Rate Disconnect Puzzle
54	3E	Agung Budilaksono	E3.2	Politeknik Keuangan Negara – STAN	Kebijakan Tarif Cukai Dalam Pengendalian Konsumsi Rokok Dengan Mempertimbangkan Kemampuan Daya Beli Dan Sumber Daya Penerimaan Negara
55	3E	Mohtar Rasyid	E3.3	Universitas Trunojoyo	Respon Asimetri Permintaan Rokok Terhadap Cukai dan Implikasinya terhadap Penerimaan Negara
56	3E	Albertus Girik Allo	E3.4	Universitas Papua	Apakah Perilaku Merokok Orang Tua Berdampak pada Investasi Sumberdaya Manusia?

**DETERMINAN TIMELINESS PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014)**

Nani Ardiyah

Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Provita Wijayanti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRACT

Regional Budget, well-known as APBD, is annual financial plan of local government which is discussed and agreed by the local government and the Parliament. Then, it is legalized by regional regulations. The determination of the budget should be done in time, so that, the program and development activities which are planned previously can be realized in the fiscal year. The aims to analyze the factors that affect the timeliness of local government budget in Central Java.

This study use the local government at district or city in Central Java in 2012-2014 as the population. Purposive sampling is the sampling technique in this study. Data of this study are obtained from the Central Java Supreme Audit Board (BPK Jawa Tengah), the Finance Bureau, the General Election Commission (KPU), The central Statistics Agency (BPS) and Local Government website. Total samples amounted to 102 derived from the 34 Regional districts or cities in Central Java with a three-year observation period. This research uses logistic regression analysis to test the hypotheses.

The results show that there is a significant positive effect between the background and Leverage on the timeliness of regional budget (APBD). While the Local Government Size, Age, Size of Parliament, Parliament Composition, Liquidity, Auditor's Opinion and the General Allocation Fund (DAU) do not have significant effect on the timeliness of regional budget (APBD).

Keywords : Determinants, Timeliness, Determination of budget

ABSTRAKSI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau biasa disebut dengan APBD adalah keuangan Pemda yang direncanakan secara tahunan dan disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penetapan dengan peraturan daerah. APBD sudah seharusnya ditetapkan secara tepat waktu agar seluruh aktivitas pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang berpengaruh pada timeliness penetapan APBD di wilayah Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan seluruh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2014 sebagai populasi. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Data diperoleh dari kantor BPK, kantor Biro Keuangan Jawa Tengah, kantor KPU Jawa Tengah, kantor BPS Jawa Tengah dan website Pemerintah Daerah. Total Sampel pada penelitian ini berjumlah 102 yang berasal dari 34 Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah dengan tiga tahun periode pengamatan. Analisis regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji regresi logistik.

Pengujian hipotesis menunjukkan ada pengaruh positif signifikan antara Latar belakang Kepala Daerah dan Leverage terhadap timeliness penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Size Pemda, Usia Kepala Daerah, Ukuran DPRD, Komposisi DPRD, Liquidity, Auditor's Opinion, dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap timeliness penetapan APBD.

Kata kunci : *Determinan, Timeliness, Penetapan APBD*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa seluruh rantai kegiatan mulai dari merencanakan, melaksanakan, menata, melaporkan, mem-pertanggungjawabkan sampai mengawasipengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan pelaksanaan semua aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam suatu sistem serta ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dapat diartikan sebagai keuangan pemerintah daerah yang direncanakan, dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, setelah itu disahkan melalui peraturan daerah. APBD merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara yaitu melayani segenap masyarakat Indonesia. (Sari, 2015)

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau biasa disebut dengan APBD adalah keuangan Pemda yang direncanakan secara tahunan dan disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penetapan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Permendagri No. 37 Tahun 2014, APBD adalah pedoman untuk mengelola keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Definisi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peranan APBD bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai rencana aktivitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tersebut. APBD menjadi penting karena seluruh kegiatan dan program pembangunan daerah hanya dapat terlaksana dengan baik jika APBD sudah ditetapkan. APBD tersebut juga memiliki fungsi otorisasi, yaitu sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengelola keuangan khususnya pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Fungsi dari APBD itu sendiri tidak hanya sebagai fungsi otorisasi, melainkan sebagai fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi (Permendagri 13/2006 Pasal 15). Oleh karena itu, keberadaan APBD sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, wajib bagi kepala daerah dan DPRD untuk menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran 2016 dimulai. Kepala daerah beserta DPRD yang tidak menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran 2016 sebelum tahun anggaran 2016 dimulai, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan hak-hak keuangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam waktu enam bulan. Kepala daerah yang terlambat dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran 2016 kepada DPRD sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka sanksi tidak bisa dikenakan kepada pimpinan maupun anggota DPRD. (Permendagri No.52 Tahun 2015)

Terkait dengan adanya sanksi tersebut, maka penetapan APBD haruslah dilakukan secara tepat waktu agar kegiatan-kegiatan daerah dan proyek pembangunan yang sudah terencana dapat terealisasi tepat pada tahun anggaran tersebut. Menurut Kartiko pada tahun 2011, Persoalan keterlambatan penetapan APBD berdampak secara sistematis terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pertama, lambannya penyerapan belanja APBD. Kedua, tingginya dana kas daerah yang menganggur pada pertengahan tahun anggaran. Ketiga, tingginya aktivitas kegiatan atau proyek di daerah pada akhir tahun menjelang tutup buku anggaran. Keempat, upaya percepatan belanja daerah di akhir tahun yang tidak efektif akan menimbulkan permasalahan baru ketika daerah tidak mampu sepenuhnya menghabiskan anggaran belanjanya.

Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam memberikan informasi yang relevan adalah ketepatan waktu. Informasi yang relevan harus memiliki karakteristik nilai dan tersaji secara tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi juga harus disajikan tepat waktu agar lebih bermanfaat bagi pengguna untuk membuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Sebuah informasi juga akan kehilangan relevansinya jika telah dilakukan penundaan dalam melaporkan walaupun rentang penundaan tersebut tidak signifikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD secara tidak tepat waktu dapat pula menjadi benih munculnya korupsi, (KPK,2008). Adanya usaha dan kesempatan untuk mengalihkan sisa dana dari program pelaksanaan APBD ke dalam rekening milik pribadi merupakan benih-benih munculnya tindakan korupsi (Wangi dan Ritonga, 2010).

Keterlambatan penetapan APBD sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di dunia pemerintahan. Saat ini, pemerintah daerah masih kurang mampu untuk memenuhi tanggal waktu yang telah diatur dan aturan tersebut sudah tertera dengan jelas dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Subechan dkk (2014), menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus. Penelitian mengenai *timeliness* atau ketepatan waktu penetapan APBD ini memiliki beberapa kontradiksi di dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai determinan *timeliness* penetapan APBD.

Penelitian mengenai ketepatan waktu atau *timeliness* penetapan APBD pemerintah daerah masih sedikit diteliti di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, variabel yang dibahas dalam penelitian *timeliness* (ketepatan waktu) penetapan APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini, peneliti menggunakan sembilan variabel independen yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, opini audit (*auditor's opinion*), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Verawaty dkk (2015) menggunakan variabel ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*auditor's opinion*).

Peneliti menambahkan variabel DAU didalam penelitian ini, karena DAU merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penetapan APBD. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa DAU adalah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah-daerah agar terjadi pemerataan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal itu berarti bahwa jika Pemerintah daerah terlambat menetapkan APBD, maka dana alokasi umum tersebut akan tertunda sehingga menyebabkan kegiatan dalam rangka pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat akan terlambat direalisasikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Size*(ukuran) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Pemerintahan daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar jika pemerintah daerah tersebut memiliki kapasitas yang besar dan jumlah transfer kekayaan yang besar pula. Tidak hanya kompleks dalam jumlah kekayaan yang besar, pemerintah daerah yang besar juga kompleks dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga, untuk mengurangi terjadinya

informasi asimetri karena kompleksnya pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus selalu melaporkan informasi keuangannya secara tepat waktu. Pemerintah daerah akan mendapatkan tekanan yang besar dari masyarakat untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi, karena mempunyai ukuran atau mempunyai aset yang besar. (Kadek dkk, 2015)

Pemerintah daerah dengan aset yang besar akan lebih mampu dan tepat waktu dalam menyusun APBD. Maka, semakin banyak aset pemerintah daerah maka semakin banyak pula pemerintah daerah dalam *timeliness* penetapan APBD (Verawaty dkk, 2015). Penelitian Sutaryo dan Carolina (2014), Verawaty dkk (2015) mengemukakan hasil pengujian *size* (ukuran) pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Sedangkan penelitian Owusu-Ansah (2000), Rachmawati (2008), dan Medina (2012) menyatakan hasil penelitian yang berbeda. Oleh karena masih terdapat adanya perbedaan dalam hasil pengujian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *size* (ukuran) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.2 Latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Latar belakang pendidikan merupakan keahlian seseorang dalam bidang ilmu yang dikuasai dengan menempuh jalur pendidikan formal. Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai tersebut akan membuat kualitas hasil pekerjaan lebih maksimal. Sama halnya dengan penganggaran penyusunan APBD, pegawai yang bekerja dalam hal penyusunan anggaran juga harus mempunyai latar belakang pendidikan mengenai ekonomi/keuangan. Dengan adanya hasil analisis faktor yang menunjukkan latar belakang pendidikan sebagai kemampuan kompetensi, maka apabila hal tersebut tidak mempunyai kesesuaian dengan adanya kegiatan dalam penganggaran akan dapat menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan APBD (Wangi dan Ritonga, 2010).

Bamber et al. (2010) mengemukakan manajer yang berpendidikan akuntansi atau ekonomi keuangan akan mendukung penyusunan anggaran yang lebih detail karena lebih teliti dan lebih paham, sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan kinerja yang lebih tinggi. (Sutaryo dan Carolina, 2014). Wangi dan Ritonga (2010) menyatakan latar belakang pendidikan yang dimiliki kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan

APBD. Sedangkan Verawaty dkk (2015) memperoleh hasil sebaliknya. Oleh karena ketidak konsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Latar belakang kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.3 Usia kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Upper echelons theory mengemukakan adanya usia manajer secara positif signifikan berhubungan dengan kecenderungan untuk bisa melihat lebih banyak informasi, mengevaluasi informasi yang lebih akurat, dan lebih lama mengambil keputusan (Hambrick dan Mason, 1984). Hal ini diperkuat oleh Taylor (1975) yang mengemukakan bahwa usia seorang manajerial dengan adanya kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dalam membuat keputusan dan kepercayaan diri seseorang dalam keputusan, meskipun terdapat kecenderungan untuk mencari informasi lebih lanjut, mengevaluasi informasi secara akurat, dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dalam membuat keputusan. Dengan demikian usia kepala daerah dapat dijadikan gambaran dalam kematangan berfikir seseorang (Sutaryo dan Carolina, 2014).

Sutaryo dan Carolina (2014) menyatakan bahwa umur kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap dalam ketepatan waktu penetapan APBD. Sedangkan Verawaty dkk (2015) menyatakan bahwa umur kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Menurut hasil temuan yang masih tidak konsisten tersebut, maka peneliti menurunkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.4 Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Semakin banyak jumlah anggota DPRD maka semakin banyak pula keragaman berfikir setiap anggota untuk memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah Sutaryo dan Carolina (2014). Sutaryo dan Jakawinarna (2013) semakin banyak jumlah anggota DPRD semakin kuat pengawasan yang dapat dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan hal ini, semakin banyak jumlah anggota DPRD maka semakin baik dalam *timeliness* penetapan APBD. Ibadin *et al* (2012) mengemukakan bukti bahwa dewan independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan dalam pelaporan keuangan di Nigeria. Verawaty dkk (2015) juga menunjukkan ukuran DPRD tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Sedangkan Wu *et al* (2008) menemukan bahwa dewan direksi independen

berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan. Sutaryo dan Carolina (2014) menyatakan terdapat pengaruh antara ukuran DPRD terhadap *timeliness* penetapan APBD. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.5 Komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Politik Indonesia menggunakan multi partai. Konsekuensinya, komposisi keanggotaan DPRD terdiri dari berbagai partai politik. Hal ini menjadikan distribusi suara di DPRD mempunyai kecenderungan untuk menyebar. Artinya sangat mungkin terjadinya koalisi dalam pemilu kepala daerah maupun parlemen daerah. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang besar, tentunya mempunyai persentase suara yang besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Dengan persentase yang besar ini tentunya melonggarkan pengawasan oleh DPRD ke pemerintah daerah karena memiliki kepentingan partai yang sama, sehingga keputusan yang diambil oleh kepala daerah cenderung untuk didukung oleh DPRD (Sutaryo dan Carolina, 2014). Sutaryo dan Carolina (2014) menunjukkan bahwa komposisi DPRD berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD. Namun, Sinaga dan Prabowo (2011), serta Afriansyah dan Haryanto (2013) menyatakan hasil tidak ada pengaruh signifikan. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H5: Komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.6 *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Liquidity merupakan kemampuan kompetensi seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang yang segera dibayarkan dengan harta lancar. *Liquidity* dalam konteks pemerintahan adalah kemampuan sumber daya pemerintah dalam mewujudkan kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo, dengan melihat aset lancar pemerintah relatif terhadap hutang lancarnya. Angka *current ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah harta lancar yang cukup dalam menutup kewajiban lancarnya dan akan menjadi berita baik untuk pemerintah daerah, sehingga Pemda bisa mampu dalam mengelola keuangan daerahnya terutama hal penyusunan anggaran tersebut (Sutaryo dan Caroline, 2014).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya oleh Wallace (1994), Aryati (1998), Suropto (1999) dan Darmawati (1999) mengemukakan bahwa adanya suatu kesehatan dalam

perusahaan dapat mencerminkan dengan tingginya rasio likuiditas (diukur dengan *current ratio*) yang tinggi. Hasil penelitian Verawaty dkk (2015), Sutaryo dan Carolina (2014) menunjukkan bahwa *liquidity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.7 *Leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Menurut Sinaga dan Prabowo (2011) *leverage* mengindikasikan sejauh mana Pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki. Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. *Leverage* yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemerintah daerah menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemerintah daerah dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci guna memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pemda juga dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan informasi oleh kreditor (Verawaty dkk, 2015). Dengan demikian, *Leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan anggaran.

Penelitian Laswad dkk, (2005) dan Rahman dkk, (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah secara sukarela melalui internet. Namun, penelitian Medina (2012) dan Sinaga dan Prabowo (2011), Verawaty dkk (2015) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.8 *Auditor's Opinion* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Laporan audit adalah suatu alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan untuk laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dalam audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan bahwa pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan dengan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di

Indonesia. Penelitian Hilmi dan Ali (2008), Supriyati dan Rolinda (2007) mengemukakan bahwa adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan berhubungan positif signifikan terhadap opini audit yang diberikan oleh auditor dan perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion* memiliki audit delay yang lebih lama. (Verawaty dkk, 2015)

Pemerintah yang menerima *unqualified opinion* akan menetapkan APBD-nya tepat waktu dibandingkan dengan pemerintah yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*. Menurut Yendrawati dan Rokhman (2008) mengemukakan adanya fenomena yang terjadi karena suatu proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Hasil pengujian Verawaty dkk (2015) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Auditor's opinion berpengaruh positif terhadap keterlambatan penetapan APBD

2.9 Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hubungan antara keterlambatan penetapan APBD dengan DAU adalah pada dasar pengenaan sanksi, setiap Pemerintah Daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD akan dikenakan sanksi pemotongan DAU sebesar 25%, pemotongan DAU sebesar 25% akan berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan operasi daerah di sebahagian proyek. Dengan adanya sanksi pemotongan DAU tersebut tentunya setiap Pemerintah Daerah berusaha menetapkan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ada. (Sari, 2015)

Elmita Sari (2015) menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD. Sedangkan menurut penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pemotongan DAU seharusnya dapat menjadi motivasi penggerak bagi Pemerintah Daerah untuk dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien agar terhindar dari sanksi pemotongan DAU, yang dapat menyebabkan dana operasional daerah tidak dapat terpenuhi. oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan alu berupaya untuk menetapkan APBD sesuai dengan waktunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H9: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2014. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel dengan kriteria pemilihan sampel yaitu pemerintah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2014, Pemerintah Kabupaten/Kota yang aktif dalam website untuk menyajikan informasi terkait dengan DPRD dan kepala daerah. Setelah dilakukan pemilihan, terdapat 34 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014 yang akan dijadikan sampel.

3.2 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Pengertian Variabel	Indikator Variabel	Skala pengukuran
1. Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	Menurut Patrick (2007), Ukuran pemerintah daerah adalah aset daerah yang merupakan sumber daya pemerintah daerah. Aset daerah dapat menjadi ukuran entitas yang memilikinya.	1. Total aset yang dimiliki	Skala nominal diukur dengan menggunakan <i>log</i> (total aset)
2. Latar belakang Kepala daerah (X2)	Patrick (2007) menyatakan bahwa pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan jika memiliki latar belakang di bidang keuangan maupun ekonomi.	1. Latar belakang pendidikan ekonomi/keuangan 2. Latar belakang Pendidikan bukan ekonomi/keuangan	Skala ordinal diukur dengan menggunakan 1 = jika kepala daerah memiliki latar belakang ekonomi/keuangan, 0 = jika kepala daerah tidak memiliki latar belakang ekonomi/keuangan.
3. Usia kepala daerah (X3)	Usia kepala daerah yang lebih tua berarti kepala daerah tersebut mencerminkan kematangan pemikiran dalam keputusan menetapkan APBD tepat waktu, karena dari berbagai pengalaman akan membuat kepala daerah lebih kompeten dalam menyusun dan menetapkan APBD tepat waktu. (Verawaty dkk, 2015)	Jumlah usia kepala daerah	Skala nominal diukur dengan menggunakan jumlah umur kepala daerah
4. Ukuran DPRD (X4)	Menurut Kahar, (2005), ukuran DPRD dapat dihitung menggunakan jumlah anggota DPRD. Jumlah anggota DPRD dapat berpengaruh dalam	Jumlah DPRD	Skala nominal diukur dengan menggunakan jumlah anggota

	mengawasi pemerintah daerah.		
5. Komposisi DPRD (X5)	Menurut Kartiko (2011), kepala daerah yang memiliki banyak dukungandari koalisi yang besar, tentu akan memiliki prosentase suara yang besar pula dalam hal pengambilan keputusan di DPRD, sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu.	Jumlah anggota dari partai pengusung kepala daerah	Skala nominal diukur menggunakan jumlah anggota dari partai pengusung kepala daerah
6. <i>Liquidity</i> (X6)	Menurut Sutaryo dan Caroline (2014), <i>Current Ratio</i> merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi hutang lancar pemerintah dengan harta lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	1. Aset Lancar 2. Hutang lancar	Skala rasio diukur menggunakan CR (<i>current rasio</i>)
7. <i>Leverage</i> (X7)	Menurut Ibadin et.al, (2012), leverage diukur menggunakan <i>debt to equity ratio</i> . <i>Debt to equity ratio</i> yang tinggi mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada bantuan dana dari pihak eksternal untuk membiayai kegiatan daerah.	1. Total hutang 2. Total ekuitas	Skala rasio diukur menggunakan <i>Debt to equity ratio</i>)
8. Auditor's Opinion (X8)	Opini audit merupakan pernyataan wajar atau tidak terhadap laporan keuangan pemerintah. Pemerintah dengan <i>unqualified opinion</i> akan menetapkan APBD-nya tepat waktu dibandingkan dengan pemerintah dengan pendapat selain <i>unqualified opinion</i> (Yendrawati dan Rokhman, 2008).	1. WTP 2. WTP dengan bahasa penjas 3. WDP 4. Tidak wajar 5. Tidak memberi pendapat	Skala ordinal diukur dengan menggunakan 1=jika WTP, 0=jika selain dari WTP
9. DAU	DAU adalah dana perimbangan dari APBN yang dialokasikan sebagai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004).	Jumlah DAU	Skala nominal diukur menggunakan besarnya dana alokasi umum sebagai insentif daerah agar terhindar dari sanksi penundaan
Variabel dependent : <i>Timeliness</i> penetapan APBD (Y)	Penetapan APBD sesuai ketentuan adalah tanggal 31 Desember yang diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2010.	1. Penetapan APBD sebelum 31 Desember 2. Penetapan APBD	Skala ordinal dengan menggunakan 1=jika tepat, 0=jika tidak tepat

		setelah 31 Desember	
--	--	---------------------	--

3.3 Teknik Analisis Regresi

3.3.1 Uji Analisis Regresi

Uji analisis menggunakan analisis regresi logistik. Uji regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas (Ghozali, 2006:225), dan heteroskedastisitas (Gujarati, 2003:597). Penelitian ini menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TIME} = b_0 + b_1 \text{UKURAN_PD} + b_2 \text{LB} + b_3 \text{UMUR} + b_4 \text{UKURAN_DPRD} + b_5 \text{KOMPOSISI} + b_6 \text{Liquidity} + b_7 \text{Leverage} + b_8 \text{Opini} + b_9 \text{DAU} + e$$

Keterangan:

TIME	=	<i>Timeliness</i> (ketepatan waktu) pemerintah daerah dalam melaporkan APBD
UKURAN_PD	=	Ukuran pemerintah daerah
LB	=	Latar Belakang kepala daerah
UMUR	=	Umur kepala daerah
UKURAN_DPRD	=	Ukuran DPRD
KOMPOSISI	=	Komposisi DPRD
Liquidity	=	<i>Current Ratio</i>
Leverage	=	<i>Debt to Equity Ratio</i>
$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_8$	=	Koefesien Regresi
Opini	=	Opini Audit
DAU	=	Dana Alokasi Umum
E	=	Error

Hipotesis alternatif diterima dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Hipotesis penelitian diterima apabila memiliki tingkat sig yang lebih kecil dari 0,05. Namun apabila tingkat sig lebih besar dari 0,05, maka hipotesis penelitian ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Uji kelayakan model regresi

Hasil Uji Kelayakan

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	11,133	8	,194

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2016

Hasil uji kelayakan model yaitu pada uji Hosmer and Lemeshow Test sebesar 0,194 > tingkat sign ($\alpha = 5\%$), maka model penelitian yaitu pengaruh *size*(ukuran) pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, usia kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*,

leverage, *auditor's opinion*, dan Dana Alokasi Umum terhadap *timeliness* penepatan APBD tergolong fit sehingga dapat untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

4.1.2 Uji Keseluruhan Model

overall model fit

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	
Step 0	1	84.500	1.077	
	2	84.272	1.200	
	3	84.272	1.204	
	4	84.272	1.204	

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2016

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients										
		Constant	Size	LB	UMUR	UKURAN	KOMPOSISI	Leverage	Liquidity	Opini	DAU	
Step 1	1	74.593	-30.561	1.079	.889	-.002	.016	-.003	.009	1.421	-.305	.000
	2	71.492	-49.263	1.701	1.494	.010	.031	-.009	.012	2.273	-.389	.000
	3	71.141	-58.562	2.001	1.791	.019	.042	-.012	.013	2.659	-.441	.000
	4	71.134	-60.078	2.050	1.842	.021	.044	-.013	.013	2.722	-.453	.000
	5	71.134	-60.110	2.051	1.843	.021	.044	-.013	.013	2.723	-.453	.000
	6	71.134	-60.110	2.051	1.843	.021	.044	-.013	.013	2.723	-.453	.000

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2016

Tabel hasil pengujian diatas menunjukkan nilai -2 log likelihood sebesar 84.272 (Block Number = 0), dan nilai -2 log likelihood sebesar 71.134 (Block Number = 1). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan nilai sehingga dapat disimpulkan *regression logistic* penelitian menunjukkan model yang baik.

4.1.3 Koefisien determinasi

Nagelkerke R square

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	71,134 ^a	,155	,235

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2016

Koefisien determinasi pada hasil uji diatas yaitu 0,155 dan nilai Nagelkerke R Square 0,235. Nilai tersebut memiliki arti bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini (*size*(ukuran) pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, usia kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, *auditor's opinion*, dan Dana Alokasi Umum) dapat menjelaskan *timeliness* penepatan APBD senilai 23,5 %, sedangkan sisanya (76,5 %) dijelaskan oleh variabel yang lain.

4.1.4 Uji Hipotesis

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Size	2,051	1,285	2,547	1	,111	7,774
	LB	1,843	,941	3,838	1	,050	6,319
	UMUR	,021	,064	,105	1	,746	1,021
	UKURAN	,044	,092	,230	1	,631	1,045
	KOMPOSISI	-,013	,054	,056	1	,812	,987
	Liquidity	,013	,015	,803	1	,370	1,014
	Leverage	2,723	1,362	3,998	1	,046	15,233
	Opini	-,453	,880	,265	1	,607	,636
	DAU	,000	,000	,599	1	,439	1,000
	Constant	-60,110	37,407	2,582	1	,108	,000

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2016

Uji hipotesis menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara Latar belakang Kepala Daerah dan Leverage terhadap *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sedangkan *Size* (ukuran) Pemda, usia kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *Liquidity*, *Auditor's Opinion*, dan DAU tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD.

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. *Size* (ukuran) pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Nilai koefisien regresi pada hasil uji yaitu 2,051 dan nilai sig 0,111. Karena nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan bahwa variabel hipotesis pertama tidak diterima. Hasil tersebut belum konsisten dengan hasil penelitian Rachmawati (2008) dan Medina (2012). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), Rahman dkk (2013), Sutaryo dan Carolina (2014), serta verawaty dkk (2015).

Beberapa hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD sebelumnya menyatakan bahwa *size*(ukuran) pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena pemerintah daerah dengan ukuran besar akan mempunyai tingkat kekayaan yang tinggi pula. Oleh sebab itu, Pemda yang lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya akan cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan penyusunan

anggaran. Jadi, jumlah aset atau kekayaan yang besar belum bisa menjadi acuan pemerintah daerah dikatakan disiplin dalam menyusun APBD. Dengan demikian variabel *size* (ukuran) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan anggaran daerah.

2. Latar belakang kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penepatan APBD

Hasil uji hipotesis yaitu latar belakang kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan Anggaran daerah dengan nilai sig 0,050 (sig = 5%). Hasil penelitian tersebut konsisten terhadap penelitian Patrick (2007), Nazier (2009), Suhardjanto dkk (2010), serta Sutaryo dan Carolina (2014) yang menyatakan bahwa latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Namun, terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak sama dengan penelitian ini, yaitu penelitian Wangi dan Ritonga (2010) serta Verawaty dkk (2015).

Hasil penelitian yang mendukung pernyataan Bamber et al. (2010), bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas seseorang dalam bekerja tergantung pada kesesuaian latar belakang pendidikan orang tersebut. Eksekutif daerah akan lebih memahami penyusunan APBD sehingga dapat terselesaikan tepat waktu jika eksekutif daerah tersebut berlatar belakang pendidikan ekonomi/keuangan. Oleh karena itu, variabel latar belakang kepala daerah berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

3. Usia kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penepatan APBD

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat koefisien 0,021 dan tingkat signifikansi 0,746, sehingga umur kepala daerah tidak memiliki pengaruh positif pada *timeliness* penepatan APBD. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Seeba et al (2009) serta Sutaryo dan Carolina (2014), namun tidak konsisten dengan Verawaty dkk (2015) yang menyatakan bahwa umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Menurut Hambrick dan Mason (1984), umur kepala daerah berpengaruh dengan besar kecilnya dan umur kepala daerah dapat menjadi tolok ukur untuk mengukur tingkat kematangan dalam pola pikir seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, penelitian ini tidak mendukung pernyataan Hambrick dan Mason tersebut, karena tingkat keseriusan pola pikir seseorang tidak hanya dilihat dari jumlah umur tetapi dilihat pula dari tingkat kompetensi keputusan yang diambil seseorang, Seeba et al. (2009). Dengan demikian variabel umur Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

4. Ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penepatan APBD

Hipotesis keempat menunjukkan nilai signifikansi 0,631 ($\alpha = 5\%$), yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Hasil ini tidak sama dengan hasil penelitian Winarna dan Murni (2007), Sutaryo dan Jakawinarna (2013), serta Sutaryo dan Carolina (2014). Akan tetapi, penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Ibadin et.al (2012) dan Verawaty dkk (2015).

Ibadin et.al (2012) menyatakan bahwa pengawasan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah akan lebih ketat jika daerah tersebut memiliki jumlah DPRD yang tinggi. Hal itu dapat terjadi karena semakin banyak jumlah anggota DPRD maka akan semakin banyak pula pihak yang mengawasi sehingga penyusunan APBD menjadi lama dan terlambat ditetapkan. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara variabel ukuran DPRD dan *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga ukuran DPRD tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Oleh karena itu, variabel ukuran DPRD tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

5. Komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Menurut hasil pengujian, hipotesis kelima ditolak karena memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,755 ($\text{sig} > 5\%$). Penelitian Kartiko (2011), Sutaryo dan Carolina (2014) memiliki hasil yang berbeda, sedangkan hasil penelitian Laswad (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afriansyah dan Haryanto (2013), serta Verawaty dkk (2015) konsisten dengan hasil penelitian, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan.

Kartiko (2011) berpendapat bahwa APBD akan lebih cepat ditetapkan apabila kepala daerah mendapatkan dukungan dari koalisi partai yang besar. Hal itu karena setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah semakin cepat diterima oleh DPRD akibat adanya kepentingan yang sama antara pemerintah daerah dengan DPRD sehingga pengawasan tidak diperketat. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut sehingga komposisi DPRD tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Longgarnya pengawasan DPRD ke pemerintah daerah tidak berpengaruh pada *timeliness* APBD. Hal itu justru membuat kepala daerah tidak merasa memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk menetapkan APBD tepat waktu karena setiap keputusan pemerintah daerah akan selalu diterima oleh DPRD dengan komposisi partai yang sama. Dengan demikian variabel komposisi DPRD tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

6. *Liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Nilai signifikansi hipotesis keenam yaitu sebesar 0,370 ($\text{sig} > 0,05$). Hasil penelitian Hilmi dan Ali (2008), Cohen (2008), serta Sutaryo dan Carolina (2014) tidak mendukung hasil penelitian ini. Namun, hasil penelitian Almilia dan Setiady (2006), Verawaty dkk (2015)

mendukung hasil penelitian ini yaitu *liquidity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Hilmi dan Ali (2008) menjelaskan bahwa *liquidity* memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut. Pemerintah yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dapat menjadi berita baik dan berita buruk. Berita baik karena hutang pemerintah daerah dapat terlunasi dengan menggunakan aset lancar milik daerah tersebut. Namun jika dilihat dari sisi *utilitas*, tingkat likuiditas yang tinggi dapat menjadi berita buruk karena hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang dapat mengelola dan menggunakan aset daerahnya secara maksimal, sehingga penyusunan anggaran dapat terhambat. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat likuiditas pemerintah daerah yang tinggi juga dapat menjadi berita buruk bagi pemerintah dan akhirnya berakibat pada terhambatnya kegiatan penyusunan anggaran daerah tersebut (Almilia dan Setiady, 2006). Dengan demikian variabel *liquidity* tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

7. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil uji hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan anggaran dengan nilai sig sebesar 0,046 (sig < 5%). Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Laswad dkk (2005), Rahman dkk (2013), serta Sutaryo dan Carolina (2014). Namun, hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Sinaga dan Prabowo (2011), Medina (2012), dan Verawaty dkk (2015).

Debt to equity ratio dapat digunakan untuk mengukur rasio *leverage* dari suatu instansi (Cohen, 2006). *Leverage* itu sendiri merupakan rasio yang berguna untuk mengetahui tingkat aktiva milik pemerintah daerah serta berasal dari hutang atau ekuitas, sehingga jumlah aktiva milik pemerintah daerah yang dibiayai dengan hutang/ekuitas dapat diketahui. Tingkat *debt to equity ratio* tinggi dapat menjadi indikasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya sendiri kurang baik dikarenakan masih bergantung pada dana pinjaman dari pihak eksternal.

Ibadin et.al (2012) juga menyatakan bahwa proses penyusunan APBD juga dipengaruhi oleh pemerintah daerah yang memiliki tingkat DER yang tinggi. *Debt to equity ratio* yang tinggi membuat pemerintah lebih diawasi oleh pihak eksternal yang sudah memberikan dana pinjaman, sehingga pemerintah daerah cenderung lebih cepat dalam mengelola keuangan daerahnya terutama dalam hal penyusunan anggaran. Dengan demikian variabel *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD.

8. *Auditor's Opinion* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD

Hasil pengujian hipotesis kedelapan ditolak, yaitu *auditor's opinion* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai sig sebesar 0,607 ($\text{sig} > 5\%$). Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Hilmi dan Ali (2008), Supriyati dan Rolinda (2007), Yendrawati dan Rokhman (2008), Yusralaini dkk (2010), Verawaty dkk (2015), yaitu ada pengaruh positif antara *auditor's opinion* dengan *timeliness* penetapan APBD.

Verawaty dkk (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan opini audit wajar tanpa pengecualian akan lebih mudah dan cepat dalam menetapkan APBD karena laporan yang mendapatkan opini WTP sudah baik dan tidak perlu tahapan-tahapan untuk mengujinya kembali. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut. Dalam kenyataannya, menetapkan dan mengajukan APBD tidak dilihat dari opini WTP. Supriyati dan Rolinda (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan dengan opini WTP akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menyusun anggaran karena tidak mengalami audit delay dan laporan keuangan dengan opini yang lain mengalami audit delay yang lebih lama. Akan tetapi, tahapan-tahapan seorang auditor dalam melakukan proses audit sehingga menghasilkan suatu opini adalah sama untuk semua jenis opini. Dengan demikian variabel *auditor's opinion* tidak dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD.

9. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD

Pengujian hipotesis kesembilan ditolak, yaitu Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini karena nilai signifikansi variabel dana alokasi umum sebesar 0,439 ($\text{sig} > 0,05$). Sesuai dengan penelitian Kartiko (2011), DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Kesimpulan dari penelitiannya adalah para aktor anggaran kurang memperdulikan sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini juga mendukung simpulan Sulistio (2013), yaitu beberapa pemerintah di Indonesia hanya berusaha untuk menghindari batasan waktu yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi penundaan DAU atau sanksi pemotongan DAU namun tidak berusaha menetapkan APBD tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, variabel dana alokasi umum tidak dapat dikatakan mempengaruhi *timeliness* penetapan anggaran daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau biasa disebut dengan APBD adalah keuangan Pemda yang direncanakan secara tahunan dan disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penetapan dengan peraturan daerah, (Permendagri No. 21 Tahun 2011). Penetapan APBD haruslah dilakukan secara tepat waktu agar kegiatan-kegiatan daerah dan proyek pembangunan yang sudah terencana dapat terealisasi tepat pada tahun anggaran tersebut. Menurut Kartiko pada tahun 2011, Persoalan keterlambatan penetapan APBD berdampak secara sistematis terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pertama, lambannya penyerapan belanja APBD. Kedua, tingginya dana kas daerah yang menganggur pada pertengahan tahun anggaran. Ketiga, tingginya aktivitas kegiatan atau proyek di daerah pada akhir tahun menjelang tutup buku anggaran. Keempat, upaya percepatan belanja daerah di akhir tahun yang tidak efektif akan menimbulkan permasalahan baru ketika daerah tidak mampu sepenuhnya menghabiskan anggaran belanjanya.

Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa latar belakang kepala daerah dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Sedangkan *Size* (ukuran) pemerintah daerah, usia kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *auditor's opinion*, dan DAU tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD.

5.2 SARAN

Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sertahanya menggunakan variabel independen *size* (ukuran) pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, usia kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, *auditor's opinion*, serta *dana alokasi umum* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *timeliness* penetapan APBD, sedangkan masih ada variabel lain yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD. Pengembangan yang dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan objek penelitian agar lebih luas, tidak hanya wilayah Jawa Tengah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen untuk memperoleh hasil penelitian mengenai *timeliness* penetapan APBD seperti dana perimbangan daerah yang lainnya, yaitu DBH dan DAK. Pemerintah daerah haruslah menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyusunan maupun penetapan anggaran dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah juga lebih baik untuk menetapkan APBD tepat pada waktunya agar tidak terjadi keterlambatan dalam membangun proyek-proyek daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, Rahmad D & Haryanto. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting*. Vol. 2, No.3, Tahun (Online). (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/>, diakses 29 November 2014).
- Almilia, Luciana Spica dan Lucas Setiady. 2006. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian dan Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ" Seminar Nasional Good Corporate Governance. Universitas Trisakti Jakarta.
- Ardi Murdoko Sudarmadji dan Lana Sularto, 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT*, Vol 2.
- Bamber, Linda S., Jiang, Jhon (Xuefeng)., & Wang, Isabel Y. 2010. What's My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4, pp: 1131-1162
- Bastian, Indra. 2008. Keterlambatan APBD Dalam Analisis Siklus. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. h. 115-130.
- Cohen, Sandra. 2006. *Identifying The Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipalities*. *Financial Accountability and Management*, Vol. 24, No. 3, pp: 0267-4424.
- Evans J., and Patton J. 1987. Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130-158.
- Fadzil, Faudziah Hanim, dan Nyoto, Harryanto. 2011. Fiscal Decentralization after Implementation of local Government Autonomy in Indonesian. *World Review of Business Research*, Vol. 1 No. 2, pp: 51-70.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Sess*. Cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*: Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Hambrick, Donald C., dan Mason, Phyllis A. 1984. Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, Vol.9, Issue 2 (April), pp:193-206.
- Hartanto, Rudy., dan Probohudono, Agung N. 2013. *Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Hilmi, Utari dan Ali, Syaiful. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di BEJ Periode 2004-2006)*. Simposium Nasional Akuntansi XI Surabaya.
- Ibadin, Izilin M., Izedonmi, Famous., and Ibadin, Peter Okoeguale. 2012. The Association Between Selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes and Timeliness of Financial Reporting in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 9, pp: 137-144.
- Jama'an. 2008. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Publik Di BEJ)*, Tesis Strata-2, Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang
- Jensen, M. and W. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and Ownership Structure, *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-360.
- Kahar, Yunelita. 2005. *Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang*. Tesis. Program 17 Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. (Tidak dipublikasikan)

- Kartiko, Sigit Wahyu. 2011. *Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah Dalam DPRD (Divided Government) Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (Budget Delay) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik*, Tesis Magister, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Mengenal dan Memberantas Korupsi, Jakarta: tp, tth.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard and Oyelere, Peter, 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 101-121. Makasar.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada situs resmi Pemerintah Daerah Indonesia*. Skripsi Sarjana (Online). (<http://lontar.ui.ac.id>, diakses 30 Oktober 2014). ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3:305-360.
- Owusu-Ansah, Stephen. 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence From the Zimbabwe Stock Exchange. *Journal Accounting and Business*, Vol. 30, No. 3.
- Patrick, Patrick A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 In Pennsylvania Local Government*. Thesis of The Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015*. Jakarta.
- Pratama, Kadek Aris Dwi, Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, No.1 Tahun 2015.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemerintah daerah*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Rachmawati, Sisty. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delays and Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-10.
- Rahman, Aditya, dkk. 2013. *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, 25-28 September. Manado
- Sari, Elmita. 2015. Pengaruh Hubungan Eksekutif Dan Legislatif, Latar Belakang Pendidikan, Divided Government Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Limapuluh Kota. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, Oktober.
- Seeba, Ali A., Wallace, James, Cornelius, Nelarine. 2009. *Managerial Characteristics, Strategy and Performance in Local Government*. *Measuring Business Excellence*, Vol. 13, No. 4, pp: 12-21
- Sinaga, Yurisca F & Prabowo. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di Internet secara sukarela oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro* (Online). (<http://eprints.undip.ac.id/>, diakses 13 November 2014)

- Subechan, dkk. 2014. Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, *Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana* Vol 17. No. 1, 2014.
- Sudarmadji, A. M. dan Lana Sularto, 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan keuangan Tahunan. *Jurnal PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Universitas Gundadharma*, Vol.2
- Suhardjanto, D., dan R.R Yulianingtyas. 2011. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1): 30-42.
- Sulistyo. 2010. Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Supriyati dan Rolinda, Yuliasri. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Finansial di Indonesia)*. Ventura, Vol 10 (3): 109:126.
- Suripto, Bambang 1999. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Keuangan Tahunan". *Simposium Nasional Akuntansi II*.
- Sutaryo & Carolina. 2014. *Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia*. SNA 17 Mataram, Lombok 24-27 September 2014.
- Sutaryo, dan Winarna, Jaka. 2013. *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Taylor, R. N. (1975). Age and Experience as Determinants of Managerial Information Processing and Decision Making Performance. *Academy of Management Journal*, 18(1), 74-81.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Verawaty, dkk. 2015. *Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 17. Mataram, Lombok.
- Wallace, L Walter. 1994. *Metode Logika Ilmu Sosial*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Tim Yasogama,
- Wangi, Chitra Ariesta P., dan Ritonga, Irwan T. 2010. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Winarna, Jaka., dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Wu, Chen-Hui, Wu, Chin-Shun & Liu, Victor W. 2008. The Release Timing of Annual Report and Board Characteristics. *The Internasional Journal of Business and Finance Research*, Vol. 2, No. 1, pp: 103-118.
- Yendrawati & Rokhman. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Go Public di BEJ. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 1, Hal. 66-75.

Yusralaini, Agusti, R & Raesya, L.D. 2010. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan ke Publik pada Perusahaan yang terdaftar di BEI 2005-2007. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 2. Juli

